
Research Article

Manajemen Pengelolaan Parawisata Way Belerang Kabupaten Lampung Selatan

Tiar Mirnasari^{1*}, A. Riva², Ratna Kumala Sari³, Yasinta Rahmawati⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung - Indonesia

Published Mei 2024

Abstract

Keywords: Tourism management, Way Belerang Hot Springs, community participation, infrastructure development, sustainable tourism.

**Corresponding author:*

E-mail:

tiarmirnasari2021@gmail.com

Tourism management is pivotal in extending the duration of tourists' stays and maximizing their expenditures in tourism destinations. Prolonged tourist presence enhances spending, stimulating various service sectors such as transportation, entertainment, accommodation, and other related services. Effective management of tourism resources is essential for economic development and sustainability.

This study focuses on the Way Belerang Hot Springs in South Lampung Regency, a significant tourism asset managed by the local government. Despite its potential, the current management practices at Way Belerang have not fully realized its prospects due to deficiencies in infrastructure and support facilities. The research identifies the need for strategic interventions to enhance the effectiveness and professionalism of tourism management.

Community participation is crucial for the sustainability of tourism initiatives. However, only 30% of the local community is currently involved in managing Way Belerang. This study highlights the importance of broader community engagement and the development of additional amenities to improve the tourist experience. Proposed improvements include the implementation of an online ticketing system and the addition of facilities such as children's pools, flying fox, massage rooms, health clinics, souvenir shops, glamping areas, camping grounds, and facilities for the elderly and disabled.

The aim of this study is to explore the current state of tourism management at Way Belerang Hot Springs and propose strategies to enhance its effectiveness. By identifying key factors that influence tourism management and the role of various stakeholders, the study seeks to contribute to the development of a sustainable tourism management model that can be replicated in other regions with similar potentials.

How to cite:

Mirnasari, T., Riva, A., Sari, R.K., & Rahmawati, Y. (2024). Manajemen Pengelolaan Parawisata Way Belerang Kabupaten Lampung Selatan., 3(1): 108-119

Pendahuluan

Manajemen pariwisata memainkan peran penting dalam memperpanjang durasi tinggal pengunjung dan memaksimalkan pengeluaran mereka di destinasi pariwisata. Kehadiran wisatawan yang berkepanjangan di suatu daerah meningkatkan pengeluaran mereka, yang selanjutnya merangsang berbagai sektor jasa seperti transportasi, hiburan, akomodasi, dan jasa terkait lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya pariwisata yang efektif sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan keberlanjutan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa sumber daya alam, termasuk tanah dan air, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusi ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya melalui pariwisata.

Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan diberi kewenangan untuk mengelola Sumber Air Panas Way Belerang, sebuah aset wisata unggulan yang memiliki potensi besar. Meskipun memiliki prospek yang menjanjikan, namun pengelolaan Sumber Air Panas Way Belerang belum sepenuhnya efektif. Praktek pengelolaan yang ada saat ini menunjukkan adanya kekurangan dalam infrastruktur dan fasilitas pendukung, yang sangat penting untuk menarik dan mempertahankan wisatawan.

Potensi wisata Way Belerang sangat besar, namun praktik pengelolaan yang ada saat ini belum sepenuhnya memanfaatkan aset-aset tersebut. Perlu adanya intervensi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pengelolaan pariwisata. Hal ini termasuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal, lembaga pemerintah, investor, dan pihak berpengaruh lainnya yang memiliki kepentingan dalam kegiatan pariwisata.

Strategi pengelolaan pariwisata yang efektif harus melibatkan partisipasi masyarakat. Saat ini, hanya 30% masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan Way Belerang, hal ini menunjukkan perlunya keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Keterlibatan pemangku kepentingan lokal dalam pengelolaan pariwisata menjamin keberlanjutan

dan keberhasilan inisiatif pariwisata.

Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana di Way Belerang juga sangat penting. Penerapan sistem tiket online dan pengembangan fasilitas tambahan seperti kolam renang anak, flying fox, ruang pijat, klinik kesehatan, toko cinderamata, area glamping, camping ground, serta fasilitas lansia dan disabilitas akan meningkatkan pengalaman wisatawan secara signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi terkini pengelolaan pariwisata di Sumber Air Panas Way Belerang dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini fokus pada identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi wisata Way Belerang. Dengan mengatasi permasalahan tersebut, studi ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki potensi serupa.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang memiliki arti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengendalikan suatu pekerjaan menjadi lebih baik agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen yang bermakna pengaturan atau pengurusan. Pariwisata merupakan aktivitas perjalanan dan kunjungan ke berbagai tempat, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, untuk tujuan rekreasi, liburan, bisnis, budaya, atau pendidikan. Sedangkan pengelolaan pariwisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan objek wisata. Tujuan dari pengelolaan pariwisata atau manajemen pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya. Melalui pengelolaan objek pariwisata sehingga mampu menarik minat wisatawan/pengunjung datang.

Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses pengkoordinasian dan pengintegrasian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kegiatan pengelolaan wisata merupakan rangkaian

upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk mewujudkan keterpaduan dari berbagai kegiatan unit-unit organisasi pariwisata. Fungsi pengelolaan atau manajemen secara garis besar dapat dipahami bahwa seluruh kegiatan manajemen tidak dapat terlepas dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan. Setiap perencanaan yang dirumuskan berasal pada tujuan yang sebelumnya telah dicanangkan. Pelaksanaan rencana tertuju pada sasaran yang jelas atau tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu perencanaan harus bersifat faktual, rasional, fleksibel, berkesinambungan dan dialektis. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat suatu perencanaan yaitu: 1) Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan; 2) Menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang; 3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; 4) Mengembangkan rencana dan penjabarannya. Seorang perencana harus mampu untuk menggambarkan pola kegiatan yang diusulkan itu secara jelas dan gamblang. Adanya perencanaan dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan, menyiapkan alat-alat darurat, menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas untuk mencapai sasaran. Setiap perencanaan dapat membantu pemanfaatan sarana yang ada secara efektif. Melalui perencanaan, seorang perencana dapat menghadapi berbagai kemungkinan permasalahan yang ada, bukan dengan tujuan mengabaikannya.

Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing sehingga terintegrasi

hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif yang harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam pengorganisasian dilakukan hal-hal berikut: 1) Penerimaan fasilitas, perlengkapan, dan staf yang 12 diperlukan untuk melaksanakan rencana. 2) Pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi yang teratur. 3) Pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi. 4) Penentuan metode kerja dan prosedurnya. 5) Pemilihan, pelatihan, dan pemberian informasi kepada staf. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang dasar dari pelaksanaan manajemen untuk mengatur seluruh sumber daya manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat ditangani oleh satu orang saja. Dengan demikian diperlukan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah suatu kelompok kerja yang efektif.

Pelaksanaan (Actuating)

Actuating merupakan suatu kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervisi, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok. Dengan demikian, dalam actuating terdapat hal-hal sebagai berikut: 1) Penetapan saat awal pelaksanaan rencana kerja; 2) Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan; 3) Pemberian motivasi para pekerja untuk segera bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing; 4) Pengkomunikasian seluruh arah pekerjaan dengan semua unit kerja; 5) Pembinaan para pekerja; 6) Peningkatan mutu dan kualitas kerja; 7) Pengawasan kinerja dan moralitas pekerja.

Pengendalian (Controlling)

Pengendalian (controlling) yakni meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal. Pengendalian dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal, yaitu atasan dapat

melakukan pengawasan kepada bawahannya, demikian pula bawahan dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya. Pengendalian terdiri atas:

- 1) Penelitian terhadap hasil kerja sesuai dengan rencana/program kerja;
- 2) Pelaporan hasil kerja dan pendataan berbagai masalah;
- 3) Evaluasi hasil kerja dan problem solving. Selain berkenaan dengan pengendalian, terdapat pula pengawasan yang dalam arti pembinaan dan pemberdayaan.

Dengan menjalankan fungsi pengawasan, seluruh personalia organisasi memiliki rasa pengabdian, komitmen dan loyalitas yang tinggi pada pekerjaan dan organisasi tempatnya berkerja. Pengawasan juga merupakan pengamatan terhadap seluruh kegiatan para pekerja dilihat dari relevansinya dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tata Kelola Pariwisata

Pengelolaan pariwisata tidak terbatas pada kawasan, obyek, dan daya tarik wisatanya saja, tetapi juga para wisatawan dan berbagai unsur penunjangnya. Sebab kelancaran pariwisata tergantung pada ketepatan manajemen berbagai unsur penunjang. Karena itu untuk ketepatan manajemen, pemanfaatan berbagai sumber daya sebagai unsur penunjang pariwisata perlu dilakukan dengan cermat dan rinci. Pentingnya pengelolaan pariwisata harus mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pariwisata, salah satu tata kelola yang digunakan dalam penelitian ini berupa Destination Management Organization (DMO). DMO merupakan tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematis melalui pemanfaatan jejaring, 14 informasi dan teknologi yang dipimpin secara terpadu dengan peran masyarakat, pelaku/asosiasi, industry, akademisi dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama. DMO memiliki 6 peran kepemimpinan dalam pengelolaan pariwisata untuk mencapai tujuan secara keseluruhan di masa depan, yakni :

- Kepemimpinan dan koordinasi.
- Perencanaan dan penelitian.

- Pengembangan produk
- Pemasaran dan promosi
- Kemitraan dan penguatan tim
- Hubungan Masyarakat

Penelitian yang Relevan

Kajian Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan untuk menunjang peneliti dalam memberikan gambaran dalam menyusun skema penulisan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Soviah, Delly Maulana, Arif Nugroho yang berjudul “Tata Kelola Pengelolaan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung” yang menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung berjalan sesuai dengan harapan baik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi konflik. Selanjutnya dalam hal Public Private Partnership tercipta kontrak yang baik antara pihak swasta dan pemerintah, namun dari pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta, dan pemerintah hanya membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata di daerah tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Widi Safitri yang berjudul “Tata Kelola Kepariwisata Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara” yang menyatakan bahwa objek wisata yang ada di Desa Lero dikelola langsung oleh masyarakat dengan tujuan menjadikan Desa Lero sebagai desa wisata yang mandiri. Namun dalam pengelolaannya masyarakat menemukan kendala pada sumber daya dalam pengembangan objek wisata serta aksesibilitas menuju objek wisata. Masyarakat berharap dalam 15 pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Filus Raraga¹, Hersen F. Korengkeng yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Obyek Wisata Air Panas Mamuya Kabupaten Halmahera Utara” yang menyatakan perlunya promosi sangat diperlukan melalui event-event pariwisata sebagai daya tarik masyarakat; menjaga

keindahan alam di sekitar tempat itu; perbaikan dan pemeliharaan jalan akses menuju lokasi; menambahkan lampu jalan di sepanjang akses jalan; perbaikan kolam, penambahan fasilitas seperti penambahan toilet, penambahan gazebo, shelter, rumah payung, dan pemeliharaan pemeliharaan; membangun beberapa fasilitas baru seperti menyediakan tempat parkir, loket penitipan, outlet merchandise (bergabung dengan pengrajin disekitarnya), membangun kesadaran akan pentingnya kebersihan; pembangunan fasilitas oleh arsitektur lokal; peningkatan fasilitas umum sebagai penunjang pariwisata.

Metodelogi Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena kajian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia”(Sulistyo, 2010).

Metode pengumpulan data didefinisikan sebagai proses, cara, atau metode yang digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- **Observasi:** Tahap pertama dalam pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan keadaan lapangan. Ini dilakukan untuk mendata, mengukur, dan memetakan kondisi potensial dan masalah yang ada di lapangan secara lebih rinci. Dengan melakukan observasi, peneliti menjadi lebih
- **Wawancara:** Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dan informan setelah observasi. Jika data observasi masih kurang mendalam, wawancara dilakukan.
- **Kuesioner:** Kuesioner adalah langkah ketiga dalam pengumpulan data, dan diberikan kepada responden dengan seperangkat pertanyaan tertulis. Kuesioner dapat dikirim secara langsung atau melalui internet. Kuesioner terbagi menjadi dua jenis: kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka.
- **Langkah keempat dalam metode pengumpulan**

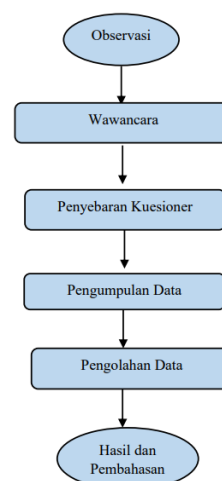
data adalah dokumentasi. Metode ini berfokus pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, termasuk dokumen tertulis, foto, gambar, dan dokumen elektronik yang dapat digunakan untuk mendukung proses penelitian. Data dari pengamatan (observasi), wawancara, dan kuesioner dilengkapi dengan dokumentasi.

Analisis Data

Selanjutnya, analisis kualitatif akan dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis kualitatif berarti bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milahnya menjadi bagian yang dapat dikontrol, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan membuat keputusan tentang apa yang dapat diberikan atau dimanfaatkan untuk orang lain.

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian pengelolaan objek wisata Way Belerang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar Tahapan penelitian pengelolaan objek wisata Way Belerang

Hasil

Deskripsi Hasil Kuesioner Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian harus merupakan data yang akurat dan memenuhi kriteria yang baik. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berupa google form. Hasil kuesioner mengenai pengadaan penginapan yang terdapat di wisata way belerang terlihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar Diagram Hasil Kuesioner Nomor 4

Berdasarkan pada gambar dapat diketahui bahwa responden sangat setuju jika sarana prasarana wisata Way Belerang dilakukan perbaikan, hal ini selaras dengan hasil kuesioner pada nomor 3 yang menyatakan bahwa sebagian besar responden mengatakan tidak setuju jika pengelolaan Way Belerang sudah baik. Dengan demikian diperlukannya perbaikan pada sarana prasarana yang terdapat di wisata Way Belerang. Adapun hasil presentase dari kuesioner Nomor 5 dapat diketahui pada gambar di bawah ini.



Gambar Diagram Hasil Kuesioner Nomor 5

Berdasarkan pada gambar terlihat bahwa responden setuju jika pengelolaan pariwisata Way belerang dikelola oleh tiga pihak yaitu Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Investor. Hal ini selaras dengan penelitian Armela Shinatni yang berjudul relasi pemerintah daerah dan swasta dalam pengelolaan destinasi wisata di kelurahan sei gohong yang menyatkan bahwa pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan.

Rencana Tata Kelola Pariwisata Way Belerang

Rencana tata Kelola Wisata Way Belerang ini merupakan kerjasama antara investor, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan masyarakat. Berdasarkan hasil instrument penelitian dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana Way Belerang perlu dikembangkan dengan baik melalui tata kelola yang tersusun. Sarana dan prasarana yang dapat dikelola di destinasi wisata Way Belerang adalah :

- 1) E-Ticket Saat ini tiket masuk Way Belerang sebesar Rp. 10.000., untuk kategori seluruh golongan. Tata kelola pada tiket masuk dapat dikembangkan melalui e-tiket yang dapat diakses secara online melalui website wisata Way Belerang. Tiket yang telah terjual melalui website selanjutnya dilakukan scanning pada gerbang masuk. Tiket masuk dapat dikembangkan menjadi 3 jenis tiket yaitu :
 - a. Tiket masuk regular mendapatkan fasilitas wisata education center, taman pertunjukkan. Berdasarkan fasilitas yang tersedia tiket masuk regular untuk weekday dapat ditarif kisaran Rp.15.000 untuk kategori golongan usia >2 tahun dan usia ≤ 2 tahun dan di atas 60 tahun sebesar Rp. 0, sedangkan untuk weekend dapat ditarif kisaran Rp.20.000 untuk kategori golongan usia >2 tahun dan usia ≤ 2 tahun dan di atas 60 tahun sebesar Rp. 0.
 - b. Tiket masuk group mendapatkan fasilitas yang ada di pariwisata Way Belerang dan minimal 1 group terdiri dari 10 orang dengan kisaran harga tiket Rp. 200.000/10 orang. Tiap 10 orang maka akan mendapatkan free 1 tiket gratis.

E-ticket dapat dikelola oleh pemerintah daerah sebagai penanggung jawab website agar terdata dan terperinci dan pihak swasta sebagai pihak ketiga sebagai tim manajemen, dengan petugas scanning barcode adalah masyarakat sebanyak 3 orang dengan tempat scanning barcode pada bagian gerbang masuk.

- 2) Parking area Area parkir yang dapat dikembangkan di pariwisata Way Belerang seluas 42x25m² yang dapat menampung ± 10 kendaraan bus ± 30 kendaraan roda 4 ±45 kendaraan beroda 2. Area parkir dapat dikelola

3-4 orang dengan 3 shift dengan setiap shift 8 jam kerja dengan melibatkan masyarakat Desa Buah Berak sebagai petugas parkir. Tarif parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)		Jumlah (Rp)
		Pengunjung	Asuransi	
1	Pejalan Kaki	9.000	1.000	10.000
2	Sepeda Motor	2.000	-	2.000
3	Sedan/Jeep	5.000	-	5.000
4	Minibus	5.000	-	5.000
5	Bu Besar	10.000	-	10.000

- 3) Education center Salah satu sarana yang dapat dikembangkan di pariwisata Way Belerang adalah arena edukasi. Arena edukasi bertujuan untuk memperluas pengetahuan, disajikan pengetahuan bagaimana menggunakan belerang sebagai masker, pelatihan pembuatan otak-otak, pengetahuan mengenai manfaat belerang, sejarah tuping 12 yang merupakan icon dari wisata Way Belerang serta sejarah dari Way Belerang, pembuatan tuping mini, dll. Arena edukasi dapat melibatkan pihak Pemerintah Daerah pada bidang pariwisata dan pedagang lokal desa Buah Berak sebagai narasumber di arena edukasi. Untuk tarif education center tidak dipungut biaya dikarenakan sudah include ke dalam harga tiket masuk.
- 4) Food Court Salah satu yang paling penting pada bagian prasarana yang perlu diadakan adalah tempat makan (Food Court). Desain food court dapat dikelola dengan konsep urban food court dan konsep cepat saji. Berdasarkan letak geografis dan kondisi pariwisata Way Belerang food court dapat dibangun sebanyak 6 bangunan dengan 12 stand yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar dengan system sewa.
- 5) Pusat Oleh-oleh Pusat oleh-oleh menjadi ciri khas jika berkunjung ke pariwisata yang dituju. Pusat oleh-oleh yang dapat dikelola pada pariwisata Way Belerang dibangun pada area dekat dengan pintu keluar. Dapat berisi belerang murni, masker belerang, otak-otak, tuping mini dll, dengan pemerintah daerah

sebagai pengelola utama dan masyarakat sebagai petugas yang menjaga pusat oleh-oleh.

- 6) Taman pertunjukan (panggung atraksi) Menurut Pearce (1989:26) taman pertunjukan (panggung atraksi) merupakan pusat yang sangat menarik perhatian wisatawan yang ingin mengunjunginya dan merupakan objek pokok dari perjalanan pariwisata mereka. Taman pertunjukan (panggung atraksi) wisata dapat dibagi berdasarkan sifat-sifat yang terdiri dari 2 (dua) jenis yakni:

- (a) Site Attraction Site attraction merupakan atraksi fisik berupa keindahan alam berupa pohon-pohon. Terdapat sebuah panggung terbuka berfungsi sebagai tempat bagi para pengunjung untuk bersantai dan bersenda gurai dalam suasana kekeluargaan. Di Pariwisata Way Belerang terdapat sebuah anak tangga menuju panggung terbuka, panggung terbuka ini berfungsi sebagai tempat bagi para pengunjung untuk menikmati hiburan yang disuguhkan pengelola.
- (b) Event Attraction Event attraction merupakan acara yang bersifat bukan permanen, event attraction dapat berupa hiburan bagi pengunjung berupa pertunjukan kesenian dan pertandingan. Pada pariwisata Way Belerang event attraction yang bisa dilakukan adalah panggung hiburan berupa acara live music, pagelaran, dan tarian yang disajikan oleh pengelola. Sedangkan acara pertandingan yang diadakan bisa dilakukan oleh pihak swasta maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan seperti perayaan ulang tahun atau perayaan hari besar lainnya.

Tarif untuk taman pertunjukkan ini gratis dan sudah include ke dalam tiket masuk.

- 7) Flying Fox Flying Fox di Pariwisata Way Belerang merupakan wahana berbasis adrenalin. Alasan dipilihnya Flying fox sebagai salah satu wahana pariwisata di Way Belerang yang mana dampak dari wahana ini akan sangat besar terhadap pendapatan pengelola (Wardhana, 2021). Flying fox didesain dengan menggunakan bahan besi, dengan ketinggiannya 6 meter dan panjang lintasan 60 meter. Untuk perangkat keselamatan menggunakan standard nasional untuk menjamin mutu keamanan dan

kenyamanan. Tarip untuk flying fox Rp. 15.000/orang/1 kali naik.	Rp.5.000/orang.
8) Pemandian kolam way belerang 2 kolam umum dan 1 kolam private (woman only) Pemandian kolam way belerang dibedakan 2 kolam umum dan 1 kolam private untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Tarif masuk pemandian kolam umum yaitu Rp. 10.000,00/orang dan tarif masuk Private (woman only) Rp. 20.000/orang.	12) Ruang massage Ruang massage terdiri dari 2 ruangan yaitu ruang massage pria 5m x 3m dimana didalamnya terdapat 3 bed dan ruang massage wanita 10m x 3m terdiri dari 5 bed yang ada di dalam ruangan wanita. Therapis dibagi menjadi dua kelompok, therapis wanita untuk pengunjung wanita dan therapis pria untuk pengunjung pria. Therapis massage diambil dari masyarakat sekitar Way Belerang. Pengunjung bisa menikmati massage dengan membeli tiket di tempat (on the spot)harga tiket sebesar Rp. 50.000,00/30 menit.
9) Wahana bermain air (kolam anak-anak) Wahana bermain air (kolam anak-anak) merupakan hasil dari pemanfaatan limbah air belerang yang difiltrasi dari 3 kolam pemandian Way Belerang. Tarif masuk wahana bermain air ini Rp. 10.000/orang dan untuk di atas 60 tahun Rp. 0.	13) Kantor pengelolaan Way Belerang Kantor ini mempunyai luas 5m X 3m yang terdapat di depan kolam pemandian air panas. Kantor pengelolaan berfungsi untuk menerima, merekam, mengolah, dan mendistribusikan informasi.
10) Area glamping Glamping yang merupakan singkatan dari Glamorous Camping yang berarti berkemah tapi tetap glamor. Glamping menawarkan konsep berkemah dan menikmati alam dengan dilengkapi fasilitas nyaman dan mewah selevel akomodasi hotel. Walaupun menginap didalam tenda, wisatawan dapat menikmati kemudahan yang biasa didapat seperti kasur, peralatan baberque. Di Pariwisata Way Belerang akan terdapat kurang lebih 12 glamping dengan ukuran 4x6m2. Tiket masuk untuk Glamping untuk weekday dapat ditarif kisaran Rp.400.000 – Rp.450.000 untuk kategori golongan usia >2 tahun dan usia ≤ 2 tahun sebesar Rp. 0, sedangkan untuk weekend dapat ditarif kisaran Rp.450.000 – Rp.500.000 untuk kategori golongan usia >2 tahun dan usia ≤ 2 tahun sebesar Rp. 0	14) Klinik kesehatan Klinik ini mempunyai luas 5m X 3m yang terdapat di depan kolam pemandian Way Belerang di dalam klinik kesehatan terdapat peralatan keselamatan dan kesehatan (P3K) serta tenaga kesehatan untuk menjaga kesehatan pengunjung dan apabila pengunjung mengalami sakit dapat langsung ditangani oleh tenaga kesehatan.
11) Area camping Area ini mempunyai luas 5.500 m2 dengan fasilitas: • Training programs/ outing/ family gathering • Peralatan dan perlengkapan camping dan outbond • Trainer dan fasilitator • Staf pendukung lapangan • Fun games dan kompetisi • Sound system + sewa areal + listrik • Spanduk kegiatan (bahan banner) • Breakfast, luch dan dinner. • Dokumentasi dan fasilitas pendukung lainnya Tarif masuk area camping sebesar	15) Persediaan peralatan untuk lansia disabilitas Persediaan ini mempunyai luas 5m x 3m yaitu kursi roda yang disediakan sebanyak 10 kursi roda. Selain kursi roda yang disediakan adalah mobil kecil dan sepeda listrik yang dipakai untuk pengunjung untuk mengelilingi Parawisata Way Belerang. Mobil dan sepeda tersebut bisa disewa oleh pengunjung dengan membeli tiket langsung di tempat (on the spot) sebesar Rp.100.000,00/30 menit untuk mobil wisata dan sepeda listrik sebesar Rp. 50.000,00/30 menit.

Pembahasan

Mengutip pendapat Richardson dan Fluker, I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta menyatakan bahwa metode pengelolaan pariwisata terdiri dari beberapa tindakan, termasuk konsultasi dengan semua pemangku kepentingan. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti pertemuan formal dan terstruktur dengan pelaku industri pariwisata, konsultasi publik tentang masalah tertentu, penjajakan dan survei, konsultasi

kebijakan dengan berbagai kelompok kepentingan, dan interaksi antara departemen pemerintah terkait dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan masalah tersebut.

- Identifikasi masalah Seiring dengan bertambahnya jumlah kegiatan yang dapat dilakukan, masalah yang dihadapi sektor pariwisata akan semakin beragam. Isu-isu yang mungkin muncul dalam industri pariwisata termasuk penyebaran dan ketimpangan pendapatan antarwilayah; pembangunan infrastruktur termasuk transportasi, akomodasi, dan atraksi; investasi, termasuk akses modal dan investasi asing; kompetisi dan pemantauan pasar internasional; riset dan statistik pariwisata; pendidikan dan pelatihan pariwisata; dampak pariwisata; regulasi pemerintah, pajak, hubungan industrial, dan kebutuhan pengembangan
- Pembuatan aturan. Kebijakan yang dibuat dapat berdampak langsung atau tidak langsung pada pariwisata. Visi dan misi pembangunan pariwisata akan didorong oleh kebijakan ini.
- Pembentukan dan pembiayaan agen yang memiliki tugas khusus Agen ini bertanggung jawab untuk melakukan riset pasar, pemasaran daerah tujuan wisata, dan mendorong pembangunan fasilitas dan bisnis pariwisata. Tujuan agen ini adalah untuk menghasilkan rencana strategis sebagai panduan dalam pemasaran dan pengembangan fisik daerah tujuan wisata.
- Menyediakan sarana dan operasi. Hal ini terutama berlaku dalam kasus di mana pemilik bisnis tidak dapat menyediakan fasilitas secara mandiri. Pemerintah membantu bisnis dengan memberi modal usaha dan subsidi untuk fasilitas dan pelayanan penting yang tidak dapat dibiayai sendiri. Namun, dalam jangka panjang, ini akan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan pariwisata.
- Membuat kebijakan fiskal, peraturan, dan lingkungan sosial yang baik. Hal ini terutama diperlukan untuk mencapai tujuan atau keuntungan perusahaan.

- Menyelesaikan sengketa kepentingan masyarakat Meskipun ini adalah posisi yang menantang, itu akan menjadi salah satu yang sangat penting di era di mana konservasi sumber daya dan lingkungan menjadi prioritas utama.

Partisipasi

Untuk mengelola pariwisata Way Belerang, masyarakat sekitar harus mengawasi atau mengontrolnya. Mereka harus terlibat dalam menetapkan visi pariwisata, menentukan sumber daya yang harus dipelihara dan ditingkatkan, dan mengembangkan tujuan dan strategi untuk mengelola daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam menerapkan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya. Partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam suatu kebijakan ataupun program kegiatan. Masyarakat yang awalnya acuh tak acuh mulai memahami dan mulai berperan serta ikut serta dalam pengelolaan pariwisata Way Belerang, yaitu salah satunya masyarakat ikut berperan dalam pembentukan suatu wadah yang mengelola pariwisata di kelurahan mereka yakni Desa Buah Berak. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, tenaga, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi masyarakat dilakukan tidak hanya tahap implementasi, tetapi menyeluruh, mulai tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Berkaitan dengan pengelolaan pariwisata Way Belerang, maka peran serta pihak-pihak sangat relevan dan dibutuhkan untuk berpartisipasi baik berupa sasaran pikiran, tenaga, dan lain-lain.

Sampai pada saat ini masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata Way Belerang hanya beberapa saja. Bentuk partisipasi yang dilakukan berupa penjualan belerang dan makanan. Meskipun atas nama masyarakat Desa Buah Berak tetapi tidak semua masyarakat tersebut terlibat. Hal ini disebabkan pengelolaan pariwisata Way Belerang hanya dilakukan oleh beberapa masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyangnya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi proses pengelolaan objek pariwisata Way Belerang ini dikarenakan masih terbatasnya kapasitas kelompok masyarakat Desa Buah Berak tersebut dalam hal pengelolaan pariwisata. Kapasitas yang dimaksud adalah terkait pengetahuan serta wawasan mengenai pengelolaan

dan pemeliharaan objek wisata sampai dengan strategi promosi objek wisata. Masalah ini dapat diatasi dengan beberapa cara antara lain dengan mengikutsertakan beberapa orang dari pengelola objek wisata (Desa Buah Berak) untuk mengikuti pelatihan terkait kepariwisataan yang diadakan oleh instansi terkait seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan. Solusi lainnya yaitu kelompok masyarakat pengelola berkolaborasi dengan masyarakat lainnya serta dibantu oleh pemerintah desa setempat untuk membentuk Kelompok Dasar Wisata (Pokdarwis) dengan tujuan membentuk suatu komunitas yang memiliki kesamaan visi dalam hal pengembangan objek wisata.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Objek Wisata Way Belerang telah sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat terkait. Akan tetapi dalam penerapan prinsip tersebut masih terkendala beberapa permasalahan, yakni terkait pengelolaan pariwisata yang hanya diikuti anggota masyarakat tertentu, komunitas lokal belum seluruhnya diikutsertakan, masyarakat desa yang cenderung sedikit dalam berpartisipasi, generasi muda yang juga tidak terlalu dilibatkan, hingga terkait rendahnya upaya pengawasan oleh masyarakat. Dalam pengelolaan wisata hal penting yang perlu diperhatikan adalah keikutsertaan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan kepariwisataan. Konsep pengelolaan pariwisata yang melibatkan atau mendasarkan kepada peran serta masyarakat (community-based ecotourism) pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang menjadi obyek dan daya tarik wisata untuk mengelola jasa-jasa pelayanan bagi wisatawan seperti penginapan, pemandu wisata, penyediaan cinder mata khas yang berasal dari budaya dan flora dan fauna setempat, dan lain-lain (Pratiwi, 2023).

Keikutsertaan Para Pelaku

Para pelaku yang ikut serta dalam pengelolaan pariwisata meliputi kelompok dan institusi pemerintah daerah, investor, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata. Komposisi stakeholder pariwisata yang berada di Way Belerang hanya Pemerintah Daerah. Penerapan prinsip keterlibatan segenap pemangku kepentingan dalam Good Tourism Governance (Sunaryo, 2013:78) belum optimal melihat keaktifan dan sinergitas pemangku

kepentingan belum sepenuhnya terwujud. Penerapan prinsip tersebut sejauh ini terhambat oleh beberapa faktor, seperti terkait minimnya kontribusi pemerintah lokal, rendahnya komunikasi pemerintah dengan aktor lainnya, tidak aktifnya pokdarwis, keberadaan pelaku wisata lain yang belum tersinergikan, hingga terkait masalah keaktifan organisasi pengelola wisata itu sendiri.

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah menata seluruh pelayanannya dengan sebaik-baiknya karena merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ini berarti bahwa aparatur pemerintah bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas semua kebijakan yang diterapkannya. Kebijakan pembangunan harus menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata harus memprioritaskan peluang pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus memastikan tanggung jawab dan memastikan bahwa sumber daya yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

Perencanaan yang sudah dibuat di lokasi pariwisata Way Belerang ini akan memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal. Perekonomian di sekitar objek wisata Way Belerang dapat ditingkatkan dengan perencanaan yang mempertimbangkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Selain itu, kelestarian alam dapat dijaga melalui pemanfaatan yang tidak berlebihan dari sumber daya seperti tanah, air, dan udara. Perencanaan yang mempertimbangkan kedua hal ini akan memungkinkan pengelolaan objek pariwisata Way Belerang untuk bertanggung jawab. Selain pengelola, bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak diperlukan. Ini termasuk dukungan dari pemerintah setempat, masyarakat, pengunjung, dan wisatawan. Keseluruhan pencapaian prinsip tersebut masih jauh dari optimal. Hal ini disebabkan oleh kepentingan keuntungan bagi lingkungan masyarakat dan kualitas manusia, terutama dalam hal keuntungan sosial dan ekonomi. Wisata yang ada belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat sekitar. Tidak adanya pondasi yang kokoh dan jaringan kerjasama yang

luas dalam pengelolaan menghalangi hal ini, sehingga jumlah aktivitas wisata yang dilakukan masih sangat kecil. Selain itu, masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan hanya dapat berpartisipasi dalam masyarakat tertentu.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata Way Belerang membutuhkan tata kelola yang baik dan rinci. Ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa 56% responden sangat setuju dengan pengembangan fasilitas pariwisata Way Belerang. Studi sebelumnya, yang berjudul "Ekowisata Pemandian Air Panas Guci", dilakukan oleh Nailah Maahira Illahi dan Lilik Kartika Sari di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menemukan bahwa objek Wisata Pemandian Air Panas Guci tetap alami dan indah. Namun, wahana yang terbengkalai tidak meningkatkan pengelolaan sampah jika fasilitas yang ada tidak memadai. Hal ini memengaruhi persepsi pengunjung tentang kualitas Objek Wisata Pemandian Air Panas Guci. Hasil observasi dan wawancara warga menunjukkan bahwa ada kebutuhan akan tata kelola yang baik, seperti kurangnya fasilitas untuk anak-anak bermain, tempat peristirahatan, dan fasilitas pemandian khusus wanita. Studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sindi Safitri dengan judul *Pengelolaan Wisata Danau Bambu Terhadap Minat Pengunjung*. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengelolaan objek wisata Danau Bambu kurang menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan objek wisata dan penggunaan, dan bahwa, sebagai destinasi wisata Desa Labuhan Ratu, pengelolaan kurang efektif, seperti yang disebutkan di bagian koran.

Kesimpulan

Pengelolaan pariwisata Way Belerang dalam meningkatkan wisatawan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan harus terdapat partisipasi masyarakat. Saat ini hanya 30% masyarakat yang dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata Way Belerang. Pengembangan pariwisata Way Belerang dikelola oleh masyarakat, institusi pemerintah daerah, investor, dan pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan tersebut. Sarana dan prasarana yang terdapat di wisata Way Belerang diperlukannya pengelolaan yang baik dengan menggunakan tiket online dan melengkapi sarana

seperti kolam air anak-anak, flying fox, ruang massage, klinik kesehatan, pusat oleh-oleh, area glamping, area camping dan outbond serta fasilitas dan peralatan untuk lansia dan disabilitas .

Saran

1. Diharapkan peran pemerintah lebih aktif dalam penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengadakan sosialisasi tentang kepariwisataan dan kebersihan lingkungan kepada masyarakat.
3. Mengadakan pelatihan tentang pembuatan kerajinan tangan kepada masyarakat.
4. Menambah pekerja kebersihan di objek wisata pemandian air panas Way Belerang.

Daftar Pustaka

- Eman, I.O.B.A.B.S.S.G.J. (2018). Strategi Pengembangan Objek Wisata Danau Linouw Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon. *Agri-SosioEkonomi*, 14(1).
- Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.
- Latupapua, M. J. H. S. (2022). Persepsi Pengunjung Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Pantai Kahino Desa Popilo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Masohi*, 03(02).
- Makal, J. T. F. D. J. L. V. Y. L. (2021). Efektivitas Pengelolaan Objek Pariwisata Wilayah Woloan Raya Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. *JAP*, 7(109).
- Mangowal, D. F. L. N. P. (2022). Pengelolaan Objek Wisata Pemandian Air Panas Ranoraindang Di Desa Leilem Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).
- Munadiah, S. M. G. S. A. W. H. (2021). Pengelolaan Wisata Permandian Air Panas Lejja Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Dan Perekonomian Masyarakat. *Siyasatuna*, 2(2).
- Nasrullah, & Dewi, A. (2015). Strategi Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Panas Lejja Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. *Barista*, 2(2).
- Salambue, R., Fatayat, F., Mahdiyah, E., & Andriyani, Y. (2020). Pengembangan daya tarik objek wisata Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 3(2), 86-95. DOI: 10.36341/jpm.v3i2.1071.

- Sofiyan, A., Hidayat, W., Winarno, G.D., & Harianto, S.P. (2019). Analisis daya dukung fisik rill, dan efektif ekowisata di Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Syvla Lestari*, 7(2), 225-234. DOI: 10.23960/jsl27225-234.
- Suryani, A.I. (2017). Strategi pengembangan pariwisata lokal. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 33-43. DOI: 10.22202/js.v3i1.1595.g902.
- Suprptini, N. (2013). Bauran pemasaran: Strategi pemasaran pariwisata di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Inkoma*, 24, 83-91.
- Zulharman, Z., & Noeryoko, M. (2022). Identifikasi potensi pengembangan daya tarik obyek wisata Air Terjun Kanduru di Desa Teta Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima NTB. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan dan Sosial*, 3(2), 70-74. DOI: 10.53299/diksi.v3i2.205.